

# REVITALISASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL

**Anto Kustanto**

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

antokustanto@gmail.com

## **A. Pendahuluan**

Di tengah lesunya perekonomian tanah air yang terindikasi dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Untuk itu sangatlah diperlukan formula guna mengembalikan perekonomian Indonesia agar lebih stabil dan berdaya saing. Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dan mempunyai tingkat keberagaman tinggi tentunya membutuhkan sebuah sistem perekonomian yang khas, berbeda dengan negara lain. UMKM! Ya, karena UMKM adalah salah satu formula yang dapat digunakan untuk menangkis pengikisan cara ke-Indonesiaan yang dilakukan oleh ekonomi asing.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, apalagi Indonesia membuktikan sebagai bangsa yang berdaulat, maka sektor UMK pun mencoba untuk distimulus supaya mencapai hasil yang signifikan. Kemudian, pemerintah memberikan sebuah kepedulian yakni melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang semakin memperkuat citra UMKM sebagai badan ekonomi di tanah air. Itu terbukti dari apa yang tertuang di dalam Bab II Pasal 2 beserta penjelasannya pada undang-undang tersebut yang pada asas-asasnya menyatakan<sup>18</sup>: 1) asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional, yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia; 2) asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat; 3) asas kebersamaan, yaitu yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; 4) asas efisiensi, yaitu asas yang mendasari pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing; 5) asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan

---

<sup>18</sup> Bab II Pasal 2 Undang – Undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang UMKM

berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri; 6) asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; 7) asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM; 8) asas keseimbangan kemajuan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional; 9) asas kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari kesatuan pembangunan ekonomi nasional.

Melihat beberapa asas tersebut, tampaknya ada upaya pemerintah untuk mendekatkan pengusaha besar dengan pengusaha kecil menengah dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan (*take and give relationship*). Sebab, UMKM telah dapat membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika, tahun 1998 badai krisis moneter menerpa, banyak investor asing yang pergi meninggalkan /mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, hanya industri kecil dan sektor riil yang mampu bertahan. Padahal, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendanaan tertentu.

Oleh karena itu, sebagai sebuah bentuk usaha yang tetap memegang teguh konsep asas-asas sebagaimana tersebutkan di atas sebagai ciri khas perekonomian di Tanah Air, maka UMKM sangat memegang peranan penting. Gerakan membumikan UMKM secara masif sekarang ini tentunya juga membutuhkan dukungan sedini mungkin, artinya : UMKM sebagai bentuk usaha yang berciri khas ekonomi Indonesia sangatlah membutuhkan pondasi yang kuat dalam berbagai aspek, utamanya adalah aspek sumber daya manusianya. Itu terasa, sebab menghadapi era global kalangan UMKM perlu memiliki kesadaran bersaing yang tinggi – bagaimanapun juga daya saing tidak diperoleh semata-mata dari proses alamiah, meskipun banyak pelaku bisnis UMKM mendapatkan semangat berjuang dari pengalaman empiris.

## **B. Permasalahan.**

Depresiasi mata uang rupiah telah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perekonomian Indonesia. Selain, melonjaknya angka pengangguran dan menyebabkan tingkat inflansi melambung ke titik yang tinggi, krisis nilai tukar juga yang memaksa Bank

Indonesia untuk menstimulus suku bunga yang tinggi, pada akhirnya akan berdampak pada kelesuan dunia usaha, sehingga sangat relevan adanya “revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah di tengah tantangan global.”

### **C. Pembahasan.**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II – 2015 sebesar 4,67 % lebih rendah dari tri wulan I – 2015 yang sebesar 4,72%. Hal itu menguatkan tren pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Untuk itu, Indonesia perlu segera untuk membangkitkan sektor ekonomi yang sekiranya dapat menjadi pilar ditengah-tengah tantangan global. Globalisasi ibarat pedang bermata dua, yakni memunculkan peluang sekaligus memberi ancaman – juga bagi UMKM. Globalisasi memberi peluang untuk memasarkan produk-produk melintasi batas geografis, namun globalisasi juga memberi sebuah tekanan pada sektor UMKM – sebagai contoh yaitu UMKM yang dalam usahanya berorientasi ekspor. Dengan segala kebaikan globalisasi yang sesungguhnya hanya persilangan budaya dan perdagangan, globalisasi juga menjadi kendaraan bagi dua ekstrem fundamentalisme yang lahir pasca perang dingin. Fundamentalisme agama dan perdagangan menjadi dua sisi koin yang berlomba menaklukkan tiap jengkal dunia atas dasar hegemoni penunggalan agama dan pasar.

Globalisasi pada satu sisi menarik kedaulatan sebagian negara – bangsa dan komunitas lokal pada arus interdependensi. Negara-negara dirasa menjadi terlalu kecil untuk mengatasi tantangan global. Dalam interdependensi tidak ada negara yang dapat mengisolasi diri. Pada sisi lain, globalisasi juga menekan negara-bangsa ke arah desentralisasi, karena dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan ditingkat lokal. Seperti di Indonesia, tekanan nyata globalisasi dalam ruang pemerintahan melahirkan otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang membawa persaingan etnosentrisme. Jadi, adanya globalisasi sesungguhnya yang terpinggirkan itu adalah hak sosial dan ekonomi masyarakat – sebab selama ini kebanyakan orang melihat pelanggaran hak asasi manusia sebatas genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis – dalam kaitan itu, pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, kekuatan korporasi selama setengah abad terakhir menyebabkan wacana hak asasi di sektor UMKM terpinggirkan. Korporasi besar dan berjangkauan global seperti pada bidang perkebunan misalnya sering berbenturan dengan masyarakat. Perjanjian dengan negara hanya melindungi hak investor, tetapi lupa untuk mewajibkan tanggung jawab investor terhadap pengusaha kecil, sehingga jelas masyarakat pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak investasi. Situasi tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan karena melahirkan ketimpangan kemakmuran antara pengusaha berskala besar dan yang berskala kecil.

Padahal, persaingan dalam bidang perdagangan di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian nasional yang mencakup perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Di Indonesia, saat ini telah banyak orang percaya bahwa sudah waktunya paradigma ekonomi kerakyatan diaplikasikan secara serius. Tidak ada lagi hak istimewa sektor usaha besar yang pada gilirannya hanya akan membunuh pengusaha kecil dan menengah. Sebagaimana Fridman dalam Elly Ruslina<sup>19</sup>, yang mendiskripsikan adanya arus global sebagai dominasi Amerika Serikat atas ekonomi dunia yaitu “*Culturally speaking globalization has tented to involve the spread (for better or worse) of Americanization*”. Kecenderungan ini telah memunculkan daya tolak dari seluruh jagad, baik berdasarkan alasan ekonomi, politik, kultur ataupun semangat nasionalisme.

Era perdagangan bebas memang menjajikan harapan sekaligus ancaman. Hanya yang paling siap, mampu merengkuh kawasan pasar baru dan apabila produk-produk lokal yang berdaya saing lemah sudah tentu akan tergerus dengan sendirinya. Saat ini begitulah situasi produk lokal yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah yang sampai saat ini masih terlihat “sempoyongan” sejak berlakunya pasar bebas. Kondisi seperti itu yang mendorong para pelaku UMKM banting stir untuk sekedar menjadi pedagang barang impor ketimbang terus berproduksi tetapi kalah bersaing. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya produk-produk China yang merangsek ke berbagai sudut pasar, hentakan sang Naga sangat terasa dampaknya terutama dari sisi harga jual.

Inilah gejala baru yang patut dicermati oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, untuk memperbaiki dan memacu daya saing produk lokal – bukan lagi mengeluhkan soal pasar bebas itu sendiri. Apabila hal tersebut tidak segera diberikan solusi, maka jika dahulu banyak industri kecil menciptakan produk – sekarang industri ditutup dan hanya berjualan, selain itu skala usaha kecil-pun turun menjadi usaha mikro – bahkan yang mikro akan turun menjadi sektor informal, karena itu yang dianggap lebih menguntungkan. Sebenarnya, jika disimak dari kecenderungan-kecenderungan di atas, justru menurunkan profit pelaku UMKM dengan jumlah konversi paling banyak terjadi seperti di

---

<sup>19</sup> Elly Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara tahun 1945*, Total Media, FH-UMJ, Jakarta, hal.343

industri garmen, kerajinan tangan dan makanan minuman. Penyerapan tenaga kerja-pun berkurang yang pada kisaran hanya sepertiga. Padahal, sekitar tahun 2010/2011 yang mungkin sampai sekarang sesungguhnya usaha UMKM mampu menyerap 96 juta tenaga kerja dengan jumlah pelaku usaha lebih dari 57 juta. Daya saing UMKM memang tidak hanya ditentukan oleh faktor kemampuan pengusaha itu sendiri dalam menjalankan roda bisnisnya. Pada era persaingan bisnis antar kawasan yang semakin terbuka, faktor eksternal dan iklim bisnis itu sendiri yang paling dominan mempengaruhi daya saing. Permasalahannya, penciptaan lingkungan inilah yang belakangan ini banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kalangan pelaku bisnis yang mewakili 99,9% populasi pengusaha di dalam negeri ini merasa bergerak lebih lambat, jika dibandingkan dengan pelaku UMKM di negara lain.

Kendati paradigma ekonomi kerakyatan belum mampu menghindarkan diri dari pendefinisian yang ambigu, sebenarnya dapat memberinya makna secara epistemologis, yakni yang mengandung unsur revitalisasi ekonomi (mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi) serta “rakyat” (elemen mayoritas dalam sebuah negara), sehingga revitalisasi UMKM merupakan upaya untuk membuat rakyat kuat dari segi ekonomi. Setelah beberapa dekade Indonesia hanya memprioritaskan sektor usaha besar, yang terbukti hanya mendorong terciptanya *bubble economy*, sehingga sudah saatnya menjadikan UMKM sebagai pilar pertumbuhan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, paradigma ekonomi kerakyatan terfokus pada bagaimana merevitalisasi sumber daya potensial yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat yang sekian lama tersembunyi di balik pusaran arus kapitalisme yang mematikan dan tidak memberikan kesempatan untuk tumbuh.

Usaha Menengah, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting di perekonomian Tanah Air, terutama karena jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh negeri yang selama ini tahan terhadap krisis. Jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta jiwa menjadi pasar yang menggiurkan. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan akhir 2015 ini, banyak negara-negara sekawasan yang melirik. Walaupun di Asean dana riset Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja. Belanja riset negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan) yang jadi pesaing Indonesia lebih dari 1% PDB. Sementara negara dengan pertumbuhan industri tinggi dan lonjakan kesejahteraan warga seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura sekitar 3%.

Alhasil, produk lokal (baca ; UMKM) Indonesia dalam bentuk publikasi pada dunia internasional ataupun paten sangat rendah, bahkan dibandingkan dengan mantan “murid”

---

<sup>20</sup> Indra Ismawan, “Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, PT. Grasindo, Jakarta, 2001, hal.72

Malaysia. Pasar produk teknologi, pertanian – peternakan hingga barang industri bermutu-pun didominasi oleh produk inovasi bangsa lain. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke negara lain masih dipenuhi bahan mentah hasil eksplorasi alam yang sebentar lagi pasti akan habis. Untuk itu, inovasi juga membutuhkan sumber daya yang memadai, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk menyalurkan itu. Menurut penulis, masalahnya terkadang antara pelaku usaha kecil dan pelaku industri (skala besar) seringkali saling mencurigai niat pemerintah untuk menjembatani ketidak selarasan tersebut. Akibatnya, upaya membangun kemitraan diantara pelaku usaha itu melalui konsep ABG ( *academy, business, government* ) atau bisa disebut dengan *triple helix* selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil optimal.<sup>21</sup> Seperti, Prijono Soegiarto<sup>22</sup> yang mengemukakan : “di tengah tantangan global pemerintah memang sudah seharusnya memberikan komitmen untuk memperkuat sektor UMKM agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Disamping itu, pemerintah juga seharusnya segera merampungkan 28 deregulasi atas peraturan dalam upaya meningkatkan kualitas UMKM dan Koperasi. Deregulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu”. Namun, dalam mengembangkan kapasitas dan daya saing UMKM pemerintah perlu dibantu oleh pihak swasta. Apabila UMKM berkembang, akan berdampak terhadap laju perekonomian dan akhirnya juga berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan di Tanah Air.

Sebagaimana sebuah pepatah yang mengatakan “*dimana bumi di pijak di situ langit di junjung*”, seharusnya pelaku usaha skala besar bisa hidup berdampingan dengan pelaku usaha kecil menengah, artinya : ada suatu kepedulian pengusaha besar yang dapat disalurkan melalui program CSR (*Corporate Responsibility Social*). Hanya, dalam mensiasati pasar yang sepi pelaku UMKM harus bisa memberikan jaminan kualitas, yakni memenuhi standar dunia industri, maka dengan standar itu UMKM diharapkan mampu bertahan ditengah himpitan perekonomian yang sulit. Sehingga, ketika kualitas produk dapat diandalkan dan apabila industri besar yang berkaitan dengan UMKM tersebut sedang lesu, bisa dialihkan ke pasar lain. Contohnya, pengalihan pasar yang bisa disiasati UMKM di bidang komponen – jika selama ini biasa memasok komponen ke perusahaan otomotif dan industri tersebut sedang surut, maka bisa mengalihkan ke industri elektronik.

Fokus pengembangan ekonomi di sektor UMKM terkadang masih tertuju pada hal-hal yang sifatnya artefak dan eksternal, seperti permodalan dan institusional – sesungguhnya dapat didorong untuk lebih maju lagi, yakni adanya kesadaran pada diri

---

<sup>21</sup> Anto Kustanto, dalam Revitalisasi UMKM ditengah Tantangan Globalisasi, 2015

<sup>22</sup> Prijono Sugiarto, “Astra Membangun UKM Berwawasan Global”, dalam Harian Suara Merdeka, 2 Januari 2016, hal.6

masing-masing pelaku UMKM untuk merambah teknologi sehingga dapat masuk pada “dunia datar”, tempat setiap orang memiliki kesempatan yang sama di internet. Semisal, yang dilakukan oleh Zaky<sup>23</sup> – pada awalnya memang sulit untuk mengajak pelaku UMKM untuk merambah teknologi untuk memasarkan produk-produknya, yakni melalui sebuah aplikasi e- Dagang yang diciptakannya. Itu semua, karena pelaku usaha kecil hanya mempunyai keinginan langsung berjualan di kios-kios, bukan di lapak-lapak virtual yang melalui situsnya hanya membeli *domain* Rp.100.000,- sebagai modal awal dan *hosting* ratusan ribu rupiah per bulan. Namun, pada akhirnya para pelaku UMKM mau untuk menggunakan metode virtual tersebut, sehingga besar kemungkinan produk-produk UMKM dapat berkembang dan siap untuk bersaing di era MEA, karena para pelaku UMKM telah memiliki sikap dalam berwira-usaha yakni “*self-help*” dan “*each for all*”, yaitu mempunyai sikap mental yang mengandung segi-segi kebanggaan atas kemampuan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan secara mandiri. Adanya *each for all* berarti hasrat mengejar kebebasan dan kesejahteraan tidak semata-mata untuk diri sendiri, tetapi untuk dan melalui orang lain (kebersamaan). Ini bukan dilandaskan hanya pada aspek filantropi, melainkan sebuah kesadaran yang realistis tentang revitalisasi.

#### **D. Penutup**

Di era global dan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebenarnya UMKM menghadapi dua titik ekstrem tentang skenario wirausaha masa depan. *Pertama*, UMKM akan menampakkan eksistensinya. Peran UMKM perlahan-lahan akan meningkat, ditandai dengan kesadaran yang tinggi dikalangan masyarakat untuk membangun kekuatan berdasarkan *collective bargaining*. Di sisi lain, pihak perusahaan berskala besar yang telah tahu akan eksistensi UMKM akan tetap “melirik” dan dijadikan mitra usaha dalam relasi yang saling menguntungkan.

---

<sup>23</sup> Achmad Zaky, “*Juragan E-Dagang Menatap Tiongkok*”, dalam Kompas, Januari 2016, hal.16

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zaky, 2016, *Juragan E-Dagang Menatap Tiongkok*, Jakarta, Harian Kompas
- Elly Ruslina, -, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara tahun 1945*, Jakarta, Total Media, FH-UMJ
- Indra Ismawan, 2001, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah*, Jakarta, PT.Grasindo
- Prijono Sugiarto, 2016, *Astra Membangun UKM Berwawasan Global*, Semarang, Harian Suara Merdeka
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM